



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIDODO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 810117

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.925.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 1.565 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 194 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
4. Tanah Seluas 1.406 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **441.000.000**

1. MOBIL, BMW 318I Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2015, LAINNYA Rp. 220.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO RS BRIO RS Tahun 2020, LAINNYA Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **12.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **8.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 2.386.000.000

III. HUTANG

Rp. 25.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.361.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.